

MATRIKS TARGET CAPAIAN
USULAN RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024

DRAFT RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) 2023 - 2024

Komitmen	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership Melalui Penguatan Verifikasi dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian/Lembaga Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)5. Kementerian Pertanian (Kementan)6. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN)
Bappenas	Direktorat Hukum dan Regulasi
CSO Mitra	Auriga Nusantara Indonesia Corruption Watch (ICW) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Transparency International (TI) Indonesia
Point of Contact Kementerian/Lembaga	:

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership	Direktorat Jenderal AHU, Kemenkumham	Tersedianya data BO yang akuntabel	Cleansing data BO tersedia dengan data <i>legal owner</i> (data AHU online), data NIK, NPWP, maupun data BO yang berasal dari ESDM, ATR/BPN, Mentan, KLHK	Cleansing data BO tersedia dengan data <i>legal owner</i> (data AHU online), data NIK, NPWP, maupun data BO yang berasal dari ESDM, ATR/BPN, Mentan, KLHK	Cleansing data BO tersedia dengan data <i>legal owner</i> (data AHU online), data NIK, NPWP, maupun data BO yang berasal dari ESDM, ATR/BPN, Mentan, KLHK	Cleansing data BO tersedia dengan data <i>legal owner</i> (data AHU online), data NIK, NPWP, maupun data BO yang berasal dari ESDM, ATR/BPN, Mentan, KLHK	
	Direktorat Jenderal AHU, Kemenkumham	Tersedianya basis data BO yang terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan serial konsultasi kajian/panduan standarisasi data BO. K/L terlibat diantaranya: KLHK, ESDM, ATR/BPN, Kementan, dengan melibatkan unsur masyarakat sipil Penyusunan kajian/panduan standarisasi data BO 	Penyusunan kajian/pedoman standarisasi data BO	Diseminasi pedoman standarisasi data BO	Penggunaan kajian/pedoman dalam melakukan standarisasi data BO	

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
	Direktorat Jenderal AHU, Kemenkumham	Tersedianya data BO yang terverifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan serial konsultasi penyusunan pedoman verifikasi data BO. K/L terlibat diantaranya: KLHK, ESDM, ATR/BPN, Kementan, dengan melibatkan unsur masyarakat sipil. Penyusunan kajian/pedoman verifikasi data BO 	Penyusunan kajian/pedoman verifikasi data BO	Diseminasi pedoman verifikasi data BO	Penggunaan kajian/pedoman dalam melakukan verifikasi data BO	
Platform <i>Beneficial Ownership</i> dengan desain yang mudah digunakan	Direktorat Jenderal AHU, Kemenkumham	Tersedianya platform BO dengan desain yang mudah digunakan	Membuka struktur data yang tersedia di platform <i>Beneficial Ownership</i> milik Direktorat Jenderal AHU kepada tim yang dilibatkan	Konsultasi serial dengan penegak hukum, peneliti, dan K/L sebagai pengguna platform	Terlibat dalam pengembangan prototype	Launching platform BO yang mudah digunakan (<i>user-friendly design</i>)	

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Pemanfaatan Data BO untuk Penapisan dalam Proses Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa.	Direktorat Jenderal AHU, Kemenkumham	Data BO sebagai syarat perizinan di sektor SDA	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan serial konsultasi untuk mendorong integrasi data BO dengan beberapa K/L. K/L terlibat diantaranya, KLHK, ATR/BPN, Kementan. Menyusun panduan/proses bisnis integrasi data BO dengan beberapa K/L. (KLHK) 	<p>Menyusun panduan/proses bisnis (petunjuk teknis) integrasi data BO dengan beberapa K/L (ATR/BPN, Kementan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Piloting integrasi data BO dengan: <ul style="list-style-type: none"> perizinan SDA. K/L terlibat diantaranya ESDM, KLHK, ATR/BPN, Kementan. Online Single Submission (OSS). K/L terlibat diantaranya BKPM. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi panduan/proses bisnis integrasi data BO dengan beberapa K/L. Mendorong adanya kebijakan/regulasi syarat BO dalam penapisan perizinan di K/L. K/L terlibat diantaranya ESDM, ATR/BPN, KLHK, Kementan, BKPM. 	Menyusun kebijakan/regulasi (produk hukum) syarat BO dalam penapisan perizinan di K/L. K/L terlibat diantaranya ESDM, ATR/BPN, KLHK	
Pemanfaatan data BO dalam proses uji tuntas integritas di K/L	KLHK, ATR/BPN, ESDM, KKP, Kementan	Data BO digunakan untuk mencegah Conflict of Interest (COI) dan identifikasi <i>Politically-exposed Persons</i> (PEPs).	<p>Menyelenggarakan serial konsultasi terkait menggunakan data BO untuk mencegah COI. K/L terlibat diantaranya KPK, ESDM, ATR/BPN, KLHK, Kementan.</p> <p>Keterlibatan dalam penyelenggaraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun legal review terhadap kebijakan perizinan dan antikorupsi di K/L guna mencegah COI dan identifikasi PEPs. Diseminasi hasil legal review. 	Menyusun kebijakan terkait integrity screening procedure di K/L terkait.	Penetapan kebijakan terkait integrity screening procedure di K/L terkait.	

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
			konsultasi terkait penggunaan data BO untuk mencegah COI dan PEPS				
Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/ Beneficial Ownership	Auriga Nusantara, ICW, PWYP, TII	Tersedianya data BO yang akuntabel	Keterlibatan perwakilan masyarakat sipil dalam rangka cleansing data BO dengan data terkait lainnya.	Membantu cleansing data BO tersedia dengan data <i>legal owner</i> (data AHU online), data NIK, NPWP, maupun data BO yang berasal dari K/L	Membantu cleansing data BO tersedia dengan data <i>legal owner</i> (data AHU online), data NIK, NPWP, maupun data BO yang berasal dari K/L	Membantu cleansing data BO tersedia dengan data <i>legal owner</i> (data AHU online), data NIK, NPWP, maupun data BO yang berasal dari K/L	
	Auriga Nusantara, ICW, PWYP, TII.	Tersedianya basis data BO yang terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam serial konsultasi kajian/panduan standarisasi data BO. Terlibat dalam penyusunan kajian/panduan standarisasi data BO 	Terlibat dalam penyusunan kajian/panduan standarisasi data BO	Terlibat dalam diseminasi pedoman standarisasi data BO	Mendorong penggunaan kajian/pedoman dalam melakukan standarisasi data BO berupa pelatihan kepada K/L dan/atau pemegang kepentingan lainnya	

Sasaran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
	Auriga Nusantara, ICW, PWYP, TII.	Tersedianya data BO yang terverifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam serial konsultasi penyusunan pedoman verifikasi data BO. Terlibat dalam penyusunan pedoman verifikasi data BO 	Terlibat dalam penyusunan pedoman verifikasi data BO	Terlibat dalam diseminasi pedoman verifikasi data BO	Mendorong penggunaan kajian/pedoman dalam melakukan verifikasi data BO berupa pelatihan kepada K/L dan/atau pemegang kepentingan lainnya	
Platform <i>Beneficial Ownership</i> dengan desain yang mudah digunakan	Auriga Nusantara, ICW, PWYP, TII.	Tersedianya platform BO dengan desain yang mudah digunakan	Mengidentifikasi struktur data yang tersedia di platform <i>Beneficial Ownership</i> milik Direktorat Jenderal AHU	Terlibat dalam konsultasi serial dengan penegak hukum, peneliti, dan K/L sebagai pengguna platform	Mengembangkan <i>prototype</i> platform BO yang mudah digunakan (<i>user-friendly design</i>)	Terlibat dalam launching platform BO yang mudah digunakan (<i>user-friendly design</i>)	
Pemanfaatan data BO dalam proses uji tuntas integritas di K/L	Auriga Nusantara, ICW, PWYP, TII	Data BO digunakan untuk mencegah Conflict of Interest (COI) dan identifikasi <i>Politically-exposed Persons</i> (PEPs).	Leading dalam serial konsultasi terkait menggunakan data BO untuk mencegah COI dan identifikasi PEPs	Leading dalam penyusunan kajian/legal review atas kebijakan perizinan dan antikorupsi di K/L guna mencegah COI dan identifikasi PEPs.	Terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait integrity screening procedure K/L Sektor SDA	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam penetapan panduan integrity screening procedure. Policy dialogue pemanfaatan data BO untuk uji tuntas integritas oleh K/L 	

